

PENGARUH REGULASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, DAN KEWAJIBAN ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP PENGEMBANGAN BUMDES PARANGJORO KABUPATEN SUKOHARJO

Firman Ghani Ahmad Fauzan ¹⁾, Darmanto ²⁾, Hasan Ma'ruf ³⁾

^{1) 2) 3)} Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Correspondence		
Email: ghaffarmuham18@gmail.com	No. Telp: 085745221069	
Submitted 24 Juli 2025	Accepted 27 Juli 2025	Published 28 Juli 2025

ABSTRACT

Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan entitas usaha desa yang dibentuk untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh positif variabel bebas terhadap Pengembangan BUMdes Parangjoro Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 52 orang anggota di BUMdes Parangjoro. Sampel yang diambil sebanyak 52 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini adalah regulasi perpajakan, insentif pajak, dan kewajiban administrasi pajak terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap pengembangan BUMdes Parangjoro. Dengan tata kelola keuangan yang tertib dan transparan akan meningkatkan pengembangan BUMdes Parangjoro menjadi lebih.

Kata kunci: Insentif Pajak; Kewajiban Administrasi Pajak; Pengembangan BUMDES; Regulasi Perpajakan.

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan entitas usaha desa yang dibentuk untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Keberadaan BUMdes diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa desa memiliki hak untuk membentuk badan usaha milik desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif.

Namun dalam praktiknya, pengembangan BUMdes tidak terlepas dari tantangan eksternal, salah satunya adalah kebijakan perpajakan. Pajak sebagai instrumen fiskal negara dapat berfungsi sebagai alat pendorong (*incentive*) ataupun sebagai beban bagi pelaku usaha, termasuk BUMdes . Menurut Musgrave, (1989), sistem perpajakan yang baik harus memenuhi asas efisiensi dan keadilan serta tidak menghambat kegiatan ekonomi produktif.

Beberapa ketentuan perpajakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tertentu dengan peredaran bruto tertentu, turut diberlakukan bagi BUMdes . Kondisi ini menimbulkan berbagai persepsi dan reaksi dari pengelola BUMdes , terutama terkait dengan kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban pajak secara berkelanjutan.

Sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan kapasitas usaha kecil dan mikro justru berpotensi menghambat pertumbuhan sektor informal dan usaha berbasis komunitas. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan perpajakan saat ini telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pengembangan BUMdes , terutama di Desa Parangjoro. Sebagai salah satu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka diperlukan kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan BUMdes . Sektor formal dan usaha berbasis komunitas. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan perpajakan saat ini telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pengembangan BUMdes,

terutama di Desa Parangjoro. Sebagai salah satu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka diperlukan kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan BUMdes.

Regulasi perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kolonial hingga saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan akan regulasi yang memenuhi perkembangan jaman dan kondisi masyarakat yang selalu berubah secara dinamis, suatu undang-undang diperlukan untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada. Demikian pula dengan regulasi di bidang perpajakan. Suatu perubahan yang terjadi pada regulasi atau hukum negara untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan seturut kondisi masyarakat merupakan salah satu pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa hukum bersifat non momentary legal, yang menyatakan bahwa perubahan terhadap hukum yang dibuat oleh negara diperlukan bagi terwujudnya kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, mengikuti peristiwa-pristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan berbagai peristiwa yang muncul secara faktual di dalam masyarakat, maka hukum yang sudah ketinggalan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masyarakat dapat diperbaiki, direvisi dan diamandemen sesuai dengan prosedur/tata cara yang sudah diatur dalam suatu perancangan hukum oleh negara. UU HPP yang diundangkan pada tahun 2021 hadir dengan berbagai perubahan signifikan, baik dari sisi tarif, jenis pajak, maupun prosedur administrasi perpajakan.

Kebijakan insentif pajak di Indonesia dirancang sebagai salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pemberian insentif perpajakan oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun, insentif perpajakan yang kebijakannya dirancang secara tidak berhati-hati dapat menjadi kontraproduktif dengan tujuan yang diharapkan. Insentif pajak telah menjadi sebuah pilihan kebijakan fiskal yang cukup populer di negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Dari sisi hukum pajak, insentif pajak dapat diterapkan sebagai bagian dari undang-undang perpajakan. Namun, banyak pula pemerintah yang menerapkan pemberian insentif pajak dengan peraturan khusus di luar undang-undang.

Praktik pemenuhan kewajiban administratif perpajakan melibatkan ketelitian baik dari wajib pajak dan pegawai pajak. Ketelitian penghitungan perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap ketentuan hukum berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, kenaikan, dan/atau bunga apabila terdapat kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum apabila terdapat kesalahan penghitungan atau penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Adapun variabel-variabel yang berpengaruh dalam pengembangan BUMdes antara lain adalah regulasi perpajakan, insentif pajak, serta kewajiban administrasi pajak. Variabel-variabel ini berpengaruh terhadap sikap dari wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak sehingga akan berdampak pada BUMdes dalam mengembangkan usahanya, apalagi di tengah pertumbuhan ekonomi yang saat ini dipandang lesu.

Desa Parangjoro di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu desa yang telah memiliki BUMdes aktif. Namun, belum ada penelitian empiris yang mengkaji secara langsung pengaruh kebijakan perpajakan terhadap perkembangan BUMdes di desa ini. Penelitian ini penting untuk melihat apakah kebijakan perpajakan selama ini menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam pengembangan unit usaha desa.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:14), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dan pengambilan sampel dilakukan secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, serta analisis

data bersifat statistik. Paradigma penelitian kuantitatif dianggap sebagai hubungan sebab akibat (kausal) antar variabel penelitian (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian untuk mengetahui hubungan atau pengaruh sebab akibat (*cause effect relationship, cause effectual relationship*) antara dua variabel atau lebih dengan tujuan menjelaskan gejala atau fenomena tertentu (Buku Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 2020).

Penulis menggunakan metode survei untuk pengambilan data. Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner yang disebar nantinya menggunakan media *penyebaran Google Form (GF)*. Adapun perhitungan statistik dalam penelitian ini untuk mengungkapkan adanya pengaruh regulasi perpajakan, insentif pajak, dan kewajiban administrasi pajak terhadap pengembangan BUMdes Parangjoro Kabupaten Sukoharjo.

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah anggota BUMdes Parangjoro Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 52 orang. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan menjadikan semua populasi menjadi sampel. Dalam penelitian ini sampelnya mencakup seluruh populasi. Sampel yang diambil adalah sebanyak 52 orang.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan atau didapatkan oleh penulis secara langsung. Menurut Nazir dalam buku Analisis Data Penelitian (2019), data primer adalah data yang didapat secara langsung dari lapangan atau objek penelitian, baik berupa pengukuran, pengamatan, maupun wawancara. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner 36 secara langsung yang disebar kepada responden.

Sedangkan metode analisis data menggunakan statistik data responden yang terdiri dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Dan ada juga uji instrumen data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, untuk uji asumsi klasik pada penelitian saya menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dan untuk pengujian hipotesa nya menggunakan uji regresi linear berganda, uji F, uji t dan koefisien determinasi R^2 .

Hasil dan Pembahasan

A. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

1. Uji Deskriptif

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota BUMDES Parangjoro dengan jumlah responden 52 orang. Kuesioner yang telah diberikan diisi dengan benar dan lengkap sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk keperluan penelitian ini. Karakteristik responden dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Untuk memperjelas karakteristik responden akan dijelaskan menggunakan tabel sebagai berikut:

a. Karakteristik Berdasarkan Umur

Karakteristik penggolongan responden pada penelitian ini berdasarkan umur responden

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Prosentase
20 sd 30	9	17,3%
31 sd 40	9	17,3%
41 sd 50	16	30,8%
>50	18	34,6%
Total	52	100%

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan umur pada tabel 1 dapat dilihat bahwa responden yang berumur 20 - 30 tahun dengan jumlah 9 orang atau 17,3%. Yang berumur 31-40 tahun berjumlah 9 orang atau 17,3%, yang berumur 41 - 50 tahun berjumlah 16 orang atau 30,8% dan yang berumur diatas 50 tahun berjumlah 18 orang atau 34,6%.

b. Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik penggolongan responden pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin responden

Tabel 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Perempuan	15	28,8%
Laki-laki	37	71,2%
Jumlah	52	100%

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 2 dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 37 orang atau 71,2%. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 15 orang atau 28,8%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik penggolongan responden pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin responden

Tabel 3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
Diploma	5	9,6%
S1	34	65,4%
S2	13	25%
Total	52	100%

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel 3 dapat dilihat responden lebih banyak pada tingkat pendidikan S1 dengan jumlah 34 orang atau 65,4%. Tingkat pendidikan S2 sebanyak 13 orang atau 25%. Sedangkan responden terendah pada tingkat pendidikan diploma dengan jumlah 5 orang atau 9,6%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan S1.

2. Uji Validitas

Untuk menguji yaitu dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson* dengan korelasi *item to total correlation*. Uji validitas instrumen digunakan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Di mana valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2005:37).

Dalam penelitian ini untuk melakukan uji validitas adalah menggunakan bantuan program SPSS Versi 23. Kriteria keputusan kesahihan dinyatakan apabila nilai r-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* rhitung > rtabel, maka butir-butir kuesioner adalah valid atau sah, sebaliknya jika *Corrected Item-Total Correlation* rhitung < rtabel maka butir-butir kuesioner adalah tidak valid (Sugiyono, 2005 : 182). Dari

hasil uji validitas dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

a. Validitas Variabel Regulasi Perpajakan (X1)

Variabel Regulasi Perpajakan terdiri dari 6 item pertanyaan dengan responden 52 orang. Pengujian validitas menggunakan teknik *one shot methods* yaitu dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dan didapatkan hasil pada tabel 4.

Tabel 4
Uji Validitas untuk Variabel Regulasi Perpajakan

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
P.1	0,809	0,273	Valid
P.2	0,819	0,273	Valid
P.3	0,805	0,273	Valid
P.4	0,805	0,273	Valid
P.5	0,805	0,273	Valid
P.6	0,809	0,273	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel Regulasi Perpajakan (X_1), yang mempunyai nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid.

b. Validitas Variabel Insentif Pajak (X2)

Variabel Insentif Pajak terdiri dari 7 item pertanyaan dengan responden 52 orang. Pengujian validitas menggunakan teknik *one shot methods* yaitu dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dan didapatkan hasil pada tabel 5

Tabel 5
Uji Validitas untuk Variabel Insentif Pajak

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
P.1	0,669	0,273	Valid
P.2	0,762	0,273	Valid
P.3	0,888	0,273	Valid
P.4	0,568	0,273	Valid
P.5	0,669	0,273	Valid
P.6	0,762	0,273	Valid
P.7	0,888	0,273	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel Regulasi Perpajakan , yang mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid.

c. Validitas Variabel Kewajiban Administrasi Pajak

Variabel Kewajiban Administrasi Pajak terdiri dari 8 item pertanyaan dengan responden 52 orang. Pengujian validitas menggunakan teknik *one shot methods* yaitu dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dan didapatkan hasil pada tabel 6.

Tabel 6
Uji Validitas untuk Variabel kewajiban Administrasi Pajak

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
P.1	0,517	0,273	Valid
P.2	0,683	0,273	Valid
P.3	0,703	0,273	Valid
P.4	0,723	0,273	Valid
P.5	0,619	0,273	Valid
P.6	0,517	0,273	Valid
P.7	0,703	0,273	Valid
P.8	0,723	0,273	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel Insentif Pajak yang mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa dari 8 item pertanyaan, 8 item dinyatakan valid.

d. Validitas Variabel Pengembangan BUMdes

Variabel kinerja pegawai terdiri dari 10 item pertanyaan dengan responden 20 orang. Pengujian validitas menggunakan teknik *one shot methods* yaitu dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dan didapatkan hasil pada tabel 7.

Tabel 7
Uji Validitas untuk Variabel Pengembangan BUMdes

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
P.1	0,794	0,273	Valid
P.2	0,852	0,273	Valid
P.3	0,880	0,273	Valid
P.4	0,820	0,273	Valid
P.5	0,833	0,273	Valid
P.6	0,807	0,273	Valid
P.7	0,918	0,273	Valid
P.8	0,835	0,273	Valid
P.9	0,820	0,273	Valid
P.10	0,856	0,273	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel Pengembangan BUMdes yang mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dari 10 item pertanyaan, semuanya valid.

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah merupakan tingkat keadaan (kuesioner) dari daftar pertanyaan yang akan disebar kepada responden. Hal ini mengandung pengertian bahwa Instrumen cukup

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah cukup baik.

Alat ukur dinyatakan punya reliabilitas yang tinggi jika alat ukur tersebut mantap dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan *Alpha Cronbach* (Sugiyono, 2005 : 184).

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 23 dengan menggunakan metode reliabiliti analisis dengan *Cronbach Alpha*. Apabila *Alpha Cronbach* > 0,60, maka dapat dikatakan kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya pabila *Alpha Cronbach* < 0,60, maka dapat dikatakan kuesioner tersebut tidak reliabel (Sugiyono, 2005).

Adapun hasil uji reliabilitas untuk semua variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Kriteria	Keterangan
Regulasi Perpajakan	0,820	0,60	Reliabel
Insentif Pajak	0,869		Reliabel
Kewajiban Adm. Pajak	0,852		Reliabel
Pengembangan BUMdes	0,954		Reliabel

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 8 di atas, maka dapat diketahui bahwa semua instrument yang digunakan untuk variabel dalam penelitian ini reliabel sehingga intrumen ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur variabel dalam penelitian ini.

B. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan dijadikan sebagai dasar pengujian hipotesis penelitian. Pengujian yang akurat dapat diperoleh apabila persamaan regresi yang diperoleh Kondisi ini dapat dicapai apabila data yang digunakan memenuhi beberapa uji prasyarat.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan pendekatan *One Kolmogorov metode Monte Carlo*. Data yang diperoleh dengan dibagikan kuesioner dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikan *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Data yang baik adalah data yang terdistribusi normal.

Tabel 9
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		52
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3,57271979
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,088
	<i>Positive</i>	0,088
	<i>Negative</i>	-0,063
<i>Test Statistic</i>		0,088
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200 ^{c,d}

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap data pada kuesioner, hasil diperoleh oleh *Monte carlo sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat

disimpulkan jika data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan pendekatan regresi linear. Model regresi linear yang baik adalah ketika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10, karena hal ini menyebabkan tidak terjadinya multikolinearitas.

Tabel 10
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Regulasi Perpajakan	0,497	2,014
Insentif Pajak	0,374	2,672
Kewajiban Adm. Pajak	0,391	2,554

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- Nilai *Tolerance* Regulasi Perpajakan adalah 0,497 nilai nya lebih besar dari 0,05 dan nilai *VIF* dari Regulasi Perpajakan sebesar 2,014 maka mempunyai nilai lebih kecil dari 10. Maka Regulasi Perpajakan dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
 - Nilai *Tolerance* Insentif Pajak adalah 0,374 nilai nya lebih besar dari 0,05 dan nilai *VIF* dari Insentif Pajak sebesar 2,672 maka mempunyai nilai lebih kecil dari 10. Maka Insentif Pajak dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
 - Nilai *Tolerance* Kewajiban Administrasi Pajak adalah 0,391 nilai nya lebih besar dari 0,05 dan nilai *VIF* dari Kewajiban Administrasi Pajak sebesar 2,554 maka mempunyai nilai lebih kecil dari 10. Maka Kewajiban Administrasi Pajak dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variabel residual yang terjadi dari suatu pengamatan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Gletjser. Jika nilai signifikan Sig. lebih dari 0,05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Rumus	Keterangan
Regulasi Perpajakan	0,051	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas.
Insentif Pajak	0,263	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas.
Kewajiban Adm. Pajak	0,548	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil dari output SPSS tersebut maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Hasil dari adalah 0,051 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dari itu Regulasi Perpajakan dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Hasil dari Insentif Pajak adalah 0,263 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dari itu Insentif Pajak dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Hasil dari Kewajiban Administrasi Pajak adalah 0,548 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dari itu variabel Kewajiban Administrasi Pajak dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independent tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak ada perbedaan varian residual.

C. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besar atau kecilnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan SPSS. Berikut nilai statistik yang diperoleh dari hasil analisis berganda.

Tabel 12
Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients	Std. Error	Coefficients	t	
1	(Constant)	-17,563	3,721		-4,719	0,000
	RP	0,647	0,167	0,317	3,868	0,000
	IP	0,702	0,170	0,390	4,138	0,000
	KAP	0,625	0,181	0,318	3,452	0,001

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel 12 dan model regresi diatas maka dapat disimpulkan hasil regresi berganda sebagai berikut :

$$PB = -17,563 + 0,647RP + 0,702IP + 0,248KAP + e$$

- Koefisien konstanta sebesar -17,563 maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 (konstan) maka variabel dependen bernilai -17,563.
- Nilai koefisien regresi regulasi pajak bernilai positif (+) sebesar 0,647, maka bisa diartikan bahwa jika regulasi pajak meningkat satu satuan maka pengembangan BUMdes juga akan meningkat sebesar 0,647 begitu juga sebaliknya, jika Regulasi pajak menurun satu satuan maka variabel pengembangan BUMdes pun akan ikut menurun sebesar 0,647 satu satuan.
- Nilai koefisien regresi insentif pajak bernilai positif (+) sebesar 0,702, maka bisa diartikan bahwa jika insentif pajak meningkat satu satuan maka pengembangan BUMdes akan meningkat sebesar 0,702 begitu juga sebaliknya, jika insentif pajak menurun satu satuan maka pengembangan BUMdes pun akan ikut menurun sebesar 0,702 satu satuan.
- Nilai koefisien regresi kewajiban administrasi pajak bernilai positif (+) sebesar 0,625, maka bisa diartikan bahwa jika kewajiban administrasi pajak meningkat satu satuan

maka pengembangan BUMdes juga akan meningkat sebesar 0,625 begitu juga sebaliknya, jika kewajiban administrasi pajak menurun satu satuan maka pengembangan BUMdes pun akan ikut menurun sebesar 0,625 satu satuan.

2. Uji F(Kelayakan Model)

Uji F adalah pengujian hipotesis koefisien regresi secara total, dimana antara β_1 , β_2 , dan β_3 diuji secara bersama-sama. Uji F ini mengikuti distribusi F sehingga tabel yang dipergunakan adalah tabel F. Adapun uji F dalam penulisan ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh secara bersama-sama antara variabel independent terhadap variabel dependent.

Tabel 13
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3421,712	3	1140,571	84,100	0,000
Residual	650,981	48	13,562		b
Total	4072,692	51			

Sumber: Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23

Dari hasil yang didapat dari uji F maka dapat ditarik kesimpulan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan hasil F hitung sebesar 84,100 lebih besar dari F tabel sebesar 4.046 Sehingga dapat diketahui jika model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki regresi fit atau layak untuk penelitian.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel bebas yaitu regulasi perpajakan, insentif pajak, dan kewajiban administrasi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat yaitu pengembangan BUMdes parangjoro Kabupaten sukoharjo. Uji t dilakukan untuk membandingkan t hitung dan t tabel dengan rumus $df = n-k$. Dalam penelitian ini nilai $df = 52-4$ atau nilai $df = 48$ dengan $\alpha = 0,05$ karena hipotesis dalam penelitian ini adalah 2 arah atau 2-tailed, sehingga didapat nilai t tabel sebesar 1,677.

Tabel 14
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	-7,563	3,721		-4,719 0,000
RP	0,647	0,167	0,317	3,868 0,000
IP	0,702	0,170	0,390	4,138 0,000
KAP	0,625	0,181	0,318	3,452 0,001

Sumber: hasil SPSS 2025

Dari tabel 14 tersebut, hipotesis dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 14 diketahui jika hasil uji t pada variabel regulasi perpajakan diperoleh nilai variabel signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan mempunyai t hitung sebesar 3.868 lebih besar dari 1,677 maka H1 diterima artinya variabel regulasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel pengembangan BUMdes.

- b. Pengujian Hipotesis Kedua
Berdasarkan tabel 14 diketahui jika hasil uji t pada variabel insentif pajak diperoleh nilai variabel signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan mempunyai t hitung sebesar 4.138 lebih besar dari 1,677, maka H1 diterima artinya variabel insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengembangan BUMdes.
- c. Pengujian Hipotesis Ketiga
Berdasarkan tabel 14 diketahui jika hasil uji t pada variabel kewajiban administrasi pajak diperoleh nilai variabel signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dan mempunyai t hitung sebesar 3.452 lebih besar dari 1,677, maka H3 diterima artinya variabel kewajiban administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengembangan BUMdes.
4. Koefisien Determinasi

Tabel 15
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,917a	0,840	0,830	3,68268

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 15 diketahui hasil dari adjusted R² sebesar 83% hal ini menunjukkan bahwa regulasi perpajakan, insentif pajak, dan kewajiban administrasi pajak terhadap hanya mampu menjelaskan pengembangan BUMdes parangjoro kabupaten sukoharjo sebesar 83% saja, selebihnya atau 17% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Regulasi Perpajakan terhadap Pengembangan BUMdes

Hasil uji t memperoleh nilai thitung > ttabel ($3,868 > 1,677$) dengan sig $0,000 < 0,05$, maka H1 diterima. Artinya Regulasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan BUMdes Parangjoro. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang mengatakan: terdapat pengaruh positif yang signifikan Regulasi Perpajakan terhadap Pengembangan BUMdes Parangjoro (Y), teruji kebenarannya.

Hasil penelitian Nugrahaningsih et al. (2023) membuktikan bahwa regulasi perpajakan yang jelas dan adanya pembinaan dari pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan BUMdes dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kepatuhan ini berdampak positif pada pengembangan usaha BUMdes karena tata kelola keuangan menjadi lebih tertib dan transparan. Berbeda dengan temuan Yunita et al. (2019) yang menyatakan bahwa regulasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan BUMdes, sebagian besar pengelola BUMdes sudah memahami peraturan perpajakan dan sudah melaksanakan kewajiban pajak secara optimal.

2. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Pengembangan BUMdes

Hasil uji t memperoleh nilai thitung > ttabel ($4,138 > 1,677$) dengan sig $0,000 < 0,05$, maka H2 diterima. Artinya Terdapat pengaruh positif Insentif Pajak terhadap Pengembangan BUMdes. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Insentif Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pengembangan BUMdes Parangjoro. Dengan terdapat peningkatan insentif Pajak, maka akan berdampak pada peningkatan Pengembangan BUMdes.

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang mengatakan: Terdapat pengaruh positif yang signifikan Insentif Pajak terhadap Pengembangan BUMdes Parangjoro (Y), teruji kebenarannya.

Hasil penelitian Arsat, (2024) membuktikan bahwa Pemberian insentif pajak berupa

tarif PPh Final UMKM yang lebih rendah memberikan keringanan beban pajak bagi BUMdes . Hal ini berdampak positif terhadap pengembangan usaha BUMdes karena dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk modal usaha dan inovasi. Namun, berbeda dengan temuan Yunita, R., dkk. (2019) yang menyatakan bahwa pemberian insentif pajak belum memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan BUMdes karena sebagian besar pengelola BUMdes belum memahami tata cara administrasi dan pemanfaatan insentif perpajakan.

3. Pengaruh Kewajiban Administrasi Pajak terhadap Pengembangan BUMdes

Hasil uji t memperoleh nilai thitung $>$ ttabel ($3,452 > 1,677$) dengan sig $0,001 < 0,05$, maka H3 diterima. Artinya “Terdapat pengaruh positif Kewajiban Administrasi Pajak terhadap Pengembangan BUMdes .” Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Kewajiban Administrasi Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pengembangan BUMdes Parangjoro. Dengan demikian apabila terdapat peningkatan Kewajiban Administrasi Pajak, maka akan berdampak pada peningkatan Pengembangan BUMdes .

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang mengatakan: terdapat pengaruh positif yang signifikan Kewajiban Administrasi Pajak terhadap Pengembangan BUMdes Parangjoro, teruji kebenarannya.

Hasil penelitian Nugrahaningsih, dkk (2023) membuktikan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan koordinasi perpajakan yang baik mendorong kepatuhan administrasi pajak BUMdes . Kepatuhan administrasi ini berkontribusi positif terhadap pengembangan usaha BUMdes karena tata kelola keuangan menjadi lebih tertib dan transparan. Namun, berbeda dengan temuan Yunita, dkk (2019) yang menyatakan bahwa kewajiban administrasi perpajakan belum sepenuhnya dijalankan oleh sebagian besar BUMdes, sehingga belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha BUMdes.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada penelitian dengan judul Pengaruh Regulasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kewajiban Administrasi Pajak terhadap Pengembangan BUMdes Parangjoro Kabupaten Sukoharjo , maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 3,868 yang lebih besar dari ttabel sebesar 1,677 dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari regulasi perpajakan terhadap pengembangan BUMdes Parangjoro. Pengelola BUMdes sudah memahami peraturan perpajakan dan sudah melaksanakan kewajiban pajak secara optimal.
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 4,138 lebih besar dari ttabel sebesar 1,677 dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari insentif pajak terhadap pengembangan BUMdes Parangjoro. Artinya semakin besar insentif pajak yang diberikan, maka semakin besar pula dampaknya terhadap pengembangan usaha BUMdes .
3. Nilai thitung sebesar $3,452 > 1,677$ dengan nilai sig $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kewajiban administrasi pajak terhadap pengembangan BUMdes Parangjoro. Artinya peningkatan kepatuhan dalam kewajiban administrasi pajak dapat mendorong pengembangan usaha BUMdes secara lebih optimal.

Referensi

- Arsy QauliRamadhani, 2022. Pengaruh Rasionalitas, Kondisi Keuangan, Dan Pemahaman perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Perpajakan BUMDES Mitra Lestari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Djarwanto, PS., dan Pangestu Subagyo, 1991, Statistik Induktif, Jakarta, BPF.
- Faisal, Sanapiah, 2001. Format-format Penelitian Sosial, Cet ke-5, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gunadi.(2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia. In Pemeriksaan Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hemels, S. (2017). Tax incentives as a creative industries policy instrument: Tax Incentives for the Creative Industries, London: Springer.
- Himpunan Undang-Undang Pajak Tahun 1983-1985 dan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 1994, C.V. Eko Jaya, Jakarta, 1994
- Imam Ghozali, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang : Diponegoro University Press.
- Lima Undang-undang tentang Perpajakan Tahun 2000, PT. Mitra Info, Jakarta, 2000 Persandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
- Musgrave, Richard A & Peggy B. Musgrave. (1989). Public Finance in Theory and. Practice, 5th ed., International Edition. Singapore: Mc. Graw-Hill Book Co.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Purbayu Budi Santoso, 2005, Analisis Statistik dengan Microsoft Exel dan SPSS. Yogyakarta : Andi Offset.
- Putri Nugrahaningsih, Denty Arista, Labaikka Dwi Ayu Rahmawati, Titik Setyaningsih. Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, 6 (2), Maret 2023, 211-224
- Putu Febry Sugiantara, Ni Kadek Sinarwati Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak BUMdes (Studi pada BUMdes di Kabupaten Buleleng). VJRA, Vol 12 No 3 Bulan Desember Tahun 2023 p-ISSN : 2337-537X ; e-ISSN : 2686-1941
- Rachmanto Surachmat, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Gramedia Pustaka Utama-Arthur Andersen, Jakarta, 2000
- Rani Mariam, 2009, Pengaruh Gaya Supervisi kepala sekolah dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Tesis, Magister Manajemen, Undip, Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Riduwan, 2005, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2002
- Rochmat Soemitro, Hukum Pajak Internasional Perkembangan dan Pengaruhnya, Penerbit Eresco, Bandung, 1977
- Salamun A.T., Pembaruan Dibidang Perpajakan, Suatu Tinjauan Umum, Majalah Prisma No.4 Tahun 1985
- Samad, Sarminah, 2005, Untraveling the Organizational Commitment and Job Performance Relationship: Exploring the Moderating Effect of Job Satisfaction”, The Business Review, Vol. 4, December.
- Santoso Brotodiharjo, 1993, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit Eresco, Bandung, Sartan, G. 1977, Pengantar Hukum Pajak Positip di Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta

- Santoso Singgih. 2000. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta : Media Komputindo.
- Santoso Tjiptono, 2001. Teknik Pengolahan Data, Yogyakarta : Andi Offset.
- Sjachran Basah, 1987. Sengketa Administrasi, Dalam Bunga Rampai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Jurusan HTN, FH UII, Yogyakarta.
- Sjafruddin Hussen, Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Kipas No. 14 Tahun 1999, DJP RI.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Praktek Hukum Tata Negara Orde Baru, Makalah Seminar Nasional Memotret Hukum Ketatanegaraan Orde Baru, Jakarta, Tanggal 24 Maret 1992
- Sudjana, 1989. Metode Statistik, Bandung : Tarsito.
- Sugiyono, 2000, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2005. Statistika Untuk Penelitian, Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 1992. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta,.
- Surrey, S. S. (2013). Pathways to tax reform: the concept of tax expenditures: Harvard University Press.
- Sutrisno Hadi, 1990. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : UGM.
- Syahrir, Ekonomi Politik dan Undang-undang Pajak, Prisma No.4 Tahun 1985 Tahun 1985
- Thaheer, H. 2005. Sistem Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tjiptono, Fandy, 1999. Manajemen Jasa, Yogyakarta : Andi Offset.
- UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Wahyuni, dkk. (2022). Analisis Peran BUMdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.
- Wignjosoebroto, Praktek Hukum Tata Negara Orde Baru, Makalah Seminar Nasional Memotret Hukum Ketatanegaraan Orde Baru, Jakarta, Tanggal 24 Maret 1992